

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dalam memenuhi komitmen dari pemerintah pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals, diperlukan adanya proses penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional. Dimana Peraturan Presiden ini mengatur tentang program Pembangunan Nasional *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berskala nasional. Program pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan

hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Program SDGs merupakan rencana aksi pemimpin seluruh dunia dalam mengakhiri tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Kemudian upaya dalam mencapai sebuah target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga sampai pada tingkat desa, sehingga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 yang berfokus pada pelaksanaan SDGs desa. Dimana dalam regulasi ini untuk mengatur mengenai penggunaan dana desa tahun 2021 yang berfokus pada upaya pencapaian program SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan agenda pembangunan global yang telah disepakati 193 negara pada 2015 yang mengganti program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun itu pula. Program SDGs ini lebih beragam yang dimana terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Proses penyusunannya melibatkan banyak negara, sumber pendanaan yang diperluas, penekanan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanggulangan kemiskinan, pelibatan pemangku kepentingan dan memiliki prinsip inklusif. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dikelompokkan menjadi empat pilar : sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum

dan tata kelola yang ditopang dengan prinsip kemitraan dan partisipasi beberapa pihak.

Pengertian dari Implementasi itu sendiri adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan public sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan (Syaukani dkk 2004 : 295). Dimana dalam pelaksanaannya terdapat serangkaian kegiatan, persiapan pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

Pelaksanaan program SGDGs (*Sustainable Development Goals*) Nasional memiliki permasalahan yang sangat besar dan kompleks yakni mengurangi jumlah angka kemiskinan dan memperbaiki permasalahan pangan. Apalagi disaat pandemi covid seperti sekarang ini kondisi ekonomi Negara Indonesia sedang diuji kekuatannya. Banyak masyarakat yang sedang berusaha memperbaiki kondisi perekonomiannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, buruh, tukang becak dan kuli bangunan. Ditambah lagi dengan terjadinya masa pandemi juga meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK karena perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga secara otomatis mengakibatkan pada bulan September 2020 persentase angka kemiskinan Negara

Indonesia meningkat sebesar 10,19 % menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dan persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan yang pada Maret 2020 sebesar 12,82 % naik pada September 2020 menjadi 13,20 % .

Sedangkan di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sendiri ini tingkat garis kemiskinan mencapai 432 KK yang terbagi dari 5 dusun. Hal ini terjadi berdasarkan banyaknya masyarakat yang ketidaktetapan pada mata pencahariannya seperti menjadi buruh, petani, kuli bangunan serta masih terdapat banyak pengangguran di Desa Kunjang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya desa harus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi pada buruh tani tersebut berdasarkan hasil penelitian yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicirikan dengan melihat rendahnya tingkat pendidikan seorang buruh tani sehingga membuat rendahnya tingkat produktivitas kerja yang berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan yang diterima masyarakat.

Masalah kemiskinan juga telah melekat lama pada pemikiran masyarakat. Pada masa kehidupan modern kemiskinan dapat dilihat dari masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan yang lain yang tersedia pada zaman sekarang ini. Mengatasi kemiskinan bukan sesuatu hal yang mudah perlu ada perencanaan dan strategi yang terintegrasi dan terkoodinir dengan matang yang dimana pemerintah harus

memunculkan suatu program pembangunan yang berkelanjutan seperti program SDGs (*Sustainable Development Goals*) .

Dalam pelaksanaan Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) terdapat 18 poin tujuan dimana salah satu tujuan yakni ingin membebaskan kawasan “Desa Tanpa Kemiskinan”. Dimana indikator Desa Tanpa Kemiskinan ini menjadi salah satu point utama dalam pengimplementasian program SDGs. Oleh karena itu berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGS) DI TINGKAT DESA (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam mengatasi kemiskinan di Desa Kunjang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi program SDGs dalam upaya pengentasan kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan program SDGs dalam mengatasi kemiskinan di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program SDGs dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Desa Kunjang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi alternative dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan Implementasi program SDGs.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai langkah yang kongkrit dalam penerapan ilmu berdasarkan teori yang telah didapat dan dapat menambah pengetahuan mengenai kondisi di Desa Kunjang Kecamatan

Ngancar Kabupaten Kediri dan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat mengambil sebuah kesimpulan dari permasalahan tersebut dengan baik.